



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN LAYANAN MANAJEMEN APARATUR

SIPIL NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DR RAHMAN HADI MSI
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 210202

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

6.498.860.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.312.865.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 415.890.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 61 m2/52 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 247.900.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 53 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 306.485.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 181.000.000
7. Tanah Seluas 453 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
8. Tanah Seluas 610 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 193.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/100 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000



10. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m²/40 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.900.000
11. Tanah Seluas 8.580 m² di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 285.400.000
12. Tanah Seluas 525 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.500.000
13. Tanah Seluas 134 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.800.000
14. Tanah Seluas 2.360 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
15. Tanah Seluas 369 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.700.000
16. Tanah Seluas 10.000 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
17. Tanah Seluas 15.000 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
18. Tanah dan Bangunan Seluas 14 m²/28 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 53.620.000
19. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m²/45 m² di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
20. Tanah Seluas 16.950 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 604.800.000
21. Tanah Seluas 35.000 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
22. Tanah Seluas 3.000 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
23. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m²/30 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
24. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
25. Tanah dan Bangunan Seluas 59 m²/59 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
26. Tanah Seluas 6.700 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
27. Tanah Seluas 5.000 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
28. Tanah Seluas 800 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL



SENDIRI Rp. 75.000.000

29. Tanah Seluas 12.000 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL

SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 110.000.000

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 373.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 320.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 7.302.360.000

III. HUTANG

Rp. 75.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.227.360.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.